

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI  
DESA MUARA BARU**

**Elista Nanda Cahyani<sup>1\*</sup>, Maudy Safitri<sup>2</sup>, Putri Rizki Handayani<sup>3</sup>, Paskasius Apridheo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

elistanandacahyaniyani@gmail.com<sup>1\*</sup>, maudysafitri12345@gmail.com<sup>2</sup>,

putririzkihandayani13@gmail.com<sup>3</sup>, dheodheo992@gmail.com<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Desa Muara Baru dalam Pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku, dan literatur artikel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat dan pemerintah desa sama-sama kurang optimal dalam Pembangunan infrastruktur, di karenakan kurangnya dana dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastrukturnya.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the role of the village government and the participation of the Muara Baru Village community in infrastructure development. This research uses a library study type of research with data collection techniques through journals, books, and literature articles. The results of this research are that the community and village government are both less than optimal in infrastructure development, due to lack of funds and community participation in infrastructure development.*

**Keywords:** Role of Government, Community Participation, Infrastructure Development

**PENDAHULUAN**

Bangunan infrastruktur adalah jenis pekerjaan pemerintah, dan hasil dari jenis bangunan ini program pengembangan infrastruktur pedesaan. Melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Ditjen Cipta Karya, pemerintah menyajikan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) untuk mendukung upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat umum melalui partisipasi massal, baik secara individual maupun kolektif. Infrastruktur adalah, pada permukaan, aset pemerintah yang dikembangkan dalam konteks bantuan masyarakat (Simbolon et al. 2021).

Menurutnya, ada dua jenis infrastruktur: infrastruktur regional dan infrastruktur lokal. Unit desa pendapan, atau “ujung tombak”, dalam jangkauan rakyat adalah alat strategis untuk keberhasilan setiap program. Penyelenggaraan desa tidak terpengaruh oleh otonomi wilayah. Akibatnya, upaya untuk memperkuat desa adalah sarana untuk memastikan dukungan masyarakat yang berkelanjutan (Widjaja, 2003:76). Prinsip-prinsip otonomi daerah meliputi demokrasi dan kesetaraan, mengakui potensi dan keanekaragaman wilayah, mematuhi hubungan antara wilayah dan rakyat, dan meningkatkan rasa martabat wilayah dengan mencantumkan daerah otonomi yang besar dan kecil di setiap provinsi atau kota.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditandai dengan kebijakan citasi Desa Pemerintah, yang bertujuan membuat Desa lebih mandiri dan mandiri. Desa adalah istilah penting yang berisi konsekuensi yang disebabkan oleh kewenangan yang lebih parah dan ketinggian anggaran yang lebih besar menuju desa untuk melindungi sumber daya dan orang-orangnya.

Alokasi Dana Desa, UU Desa Reformasi uang masuk desa dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua jumlah tersebut, menurut pernyataan, melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (APBDesa). APBDesa besar mewakili potensi dan tantangan spesifik untuk desa. Ini adalah kemampuan negara terpecah untuk melakukan manajemen keuangan yang sehat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan berakhir dengan pembayaran utang. Desa Dirilis Pasca UU, 2014(Anggoro, Hamidy, and Putra 2022).

Pembangunan infrastruktur desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang baik akses terhadap transportasi akan lebih mudah. Selain itu Pembangunan infrastruktur desa, dapat menciptakan lapangan pekerjaan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada keberlanjutan dan keberdayaan Masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur desa dapat menjadi Langkah strategis menuju Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan(Sasmito 2017). Pembangunan infrastruktur di desa Muara Baru masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan kurangnya aksesibilitas ke sumber daya. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dari pemerintah desa dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Muara Baru. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah desa dan masyarakat umum berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan infrastruktur, serta faktor-faktor spesifik apa yang menghalangi pembangunan infrastruktur di Desa Muara Baru.

## LITERATURE REVIEW

Menurut Siagian (2009:142-150), dalam hal ini, kepala distrik dan organisasinya memiliki tiga keuntungan utama, yaitu: Penstabilan adalah upaya kepala provinsi untuk membangun stabilitas di sektor konstruksi. Seperti yang kita ketahui, ada hambatan dan relasi kekuasaan dari berbagai pemangku dengan kekhawatiran tentang proyek Pembangunan (Amantha 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desas, ayat 1 menyatakan dalam ayat 2 bahwa pemerintah desa adalah penyerapan kehendak pemerintah dan kepentingan penduduk setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, di paragraf ketiga, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, atau sebagai nama lain baginya, yang mendukung Desa sebagai Pemerintahan Desa yang tak tertandingi. Seperti yang dikatakan oleh Widjaja (2004:20). Sementara pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya serta Badan Perwakilan Desa (BPD), pemerintah desa adalah kepala desa serta perangkatnya (Rahum 2015)

Partisipasi adalah komponen penting dari kegiatan konstruksi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam reformasi pemerintahan, seperti yang dinyatakan Pak Kaho (Dirjen, PMD, Departemen Dalam Negeri, 2008: 264): Beberapa faktor penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat umum adalah tingkat modal manusia, biaya, informasi, peralatan, dan perundang-undangan. Kewenangan adalah salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan konstruksi(Notoatmodjo 2008).

Menurut Adisasmita (2006), "Partisipasi masyarakat adalah masyarakat pemberdayaan, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan," dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan program. Malaysia dianggap sebagai komponen penting dalam proses pembangunan; oleh karena itu, perlu dipahami bahwa proses pembangunan harus dimulai dari bawah dan melanjutkan ke atas, yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses konstruksi. Sebagian besar waktu konstruksi ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. Masalah-

masalah yang dihadapi masyarakat umum adalah isu-isu lain yang perlu ditangani. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat umum perlu diinformasikan untuk berpartisipasi, seperti yang dinyatakan oleh Adisasmita (2006):

- a. Publik memahami keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. Komunitas mampu menganalisis penyebab dan efek berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Masyarakat memiliki kemampuan untuk datang dengan solusi untuk mengatasi masalah dan masalah yang dihadapi masyarakat;
- d. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan bahan bangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan output untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- e. Tindakan masyarakat untuk meningkatkan SDM dan kemauan kapasitasnya, bersama dengan penekanan yang kuat pada kesadaran diri dan kekuatan kehendak yang kuat, dapat secara efektif mengurangi sebagian besar eksternalitas. (Latif et al. 2019)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai jenis bahan seperti dokumen, buku, dan artikel yang ada di perpustakaan. Menurut Nazir (1988 dalam Mirzaqon (2017)), studi kepustakaan juga mengacu pada teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian pada buku, literatur, artikel, dan banyak dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu diselesaikan (Aqil 2020).

Analisis literatur juga memungkinkan untuk memeriksa berbagai sumber dan penelitian sebelumnya yang akan membantu menerapkan teori untuk masalah yang telah identifikasi. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi terkait topik dan masalah yang dibahas dalam artikel ini. Artinya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan telaah terhadap buku, literatur, memo, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Upaya pengumpulan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku akademik, laporan penelitian, artikel akademik, tesis, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis maupun elektronik lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sondang P. Siagian mendefinisikan konstruksi sebagai bisnis, atau rangkaian bisnis, yang melibatkan perubahan dan kemajuan yang signifikan yang dilakukan secara damai oleh pemerintah dan bangsa, dengan penekanan pada modernisasi dalam konteks konstruksi bangsa. (nation building). Menurut Michael P. Todaro (1992), proses konstruksi adalah jenis proses dinamis yang menghasilkan perubahan signifikan di bidang-bidang berikut:

1. Struktur sosial
2. Media massa dan organisasi nasional
3. tingkat pertumbuhan ekonomi;
4. pengurangan ketidaksetaraan

Dalam proses transformasi ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan: ketekunan dan perubahan, yang bersama-sama menciptakan dinamika dalam pertumbuhan masyarakat. Secara umum, konstruksi digambarkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum dan anggotanya; seringkali, input utama adalah material (Alim, Hariyoko, and Puspaningtyas 2022). Oleh karena itu, bangunan sebagai batu loncatan sering digambarkan sebagai konsekuensi dari krisis ekonomi tunggal; dalam beberapa keadaan yang sangat langka, bangunan didefinisikan sebagai jenis kehidupan yang tidak diharapkan dari "setengah lain" dan

sebagai ideologi politik yang memberikan dukungan kepada pemerintah yang bertekad untuk menekan mereka yang mengkritiknya (Budiman, 1995:1-2)

Jelas, konstruksi melibatkan dua tahap utama: yang pertama melibatkan masalah material yang perlu diselesaikan dan dibersihkan, dan yang kedua melibatkan masalah manusia yang menjadi masalah awal yang menjadi tanggung jawab kru konstruksi. Dalam hal apapun, tujuan akhir dari pembangunan harus adalah pengembangan umat manusia; umat manusia yang sedang dibangun adalah spesies kreatif, dan untuk menjadi kreatif harus ramah, baik hati, dan bebas dari emosi negatif. Tidak semua konstruksi terbatas pada produksi dan distribusi barang-barang nyata; untuk mempromosikan kreativitas manusia, konstruksi juga harus menetapkan kondisi manusia (Budiman, 1995: 13-14).

Dalam praktik konstruksi di banyak negara, penekanan selama tahap awal konstruksi biasanya pada peningkatan produksi. Terlepas dari banyak variasi konstruksi, konsep dasar dalam konstruksi adalah modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang paling efektif adalah untuk menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan mempromosikan industrialisasi. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam strategi serupa ini terbatas pada "faktor produksi" atau "instrument". Manusia diperlakukan sebagai alat dan bukan objek konstruksi. Manusia sebagai penghambatan maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan telah mereduksi mengalami nilai produksi dan produktivitas.

Akibatnya, peningkatan kualitas SDM dikaitkan dengan peningkatan produksi. Ini disebut sebagai pengembangan SDM dalam konteks pengembangan yang berpusat pada produksi (Tjokrowinoto, 1996). Hal ini dapat dimengerti jika perspektif paradigma bangunan yang mirip dengannya tercermin dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, link dan match, dan masalah terkait lainnya. Kualitas manusia yang meningkat adalah prasyarat untuk proses produksi dan untuk membentuk kembali masyarakat industri (Notoatmodjo 2008).

Proses pembinaan terjadi di semua tingkat masyarakat, ekonomi, sosial, agama, dan politik dan dilakukan pada tingkat makro (nasional) dan mikro (komunitas / kelompok). Salah satu aspek yang paling penting dari konstruksi adalah kebutuhan untuk perbaikan dan kemajuan, serta diversifikasi dan pertumbuhan. Setelah diperiksa dengan hati-hati, ini berkaitan dengan pengetahuan konstruksi, yang hanya ada beberapa ideogram kecil, yang sebagai berikut:

Proses pembangunan adalah suatu proses. Hal ini mengilustrasikan fakta bahwa konstruksi adalah jenis kegiatan yang berkelanjutan dan tak berujung yang terdiri dari landmark yang terjadi dalam satu organisasi independen tetapi dianggap "bagian" oleh organisasi lain karena mereka tidak pernah berakhir. Ada banyak persyaratan dalam proses ini, seperti pembatasan waktu, biaya, atau hasil yang diharapkan.

Pembangunan adalah prosedur sederhana yang dicatat sebagai tugas yang akan diselesaikan. Pekerjaan konstruksi dilakukan secara metodis, terlepas dari apakah itu jangka panjang, jangka sedang, atau jangka pendek.

Pendekatan metodis ini berarti bahwa kekhawatiran tentang apa yang akan dilakukan di masa depan pada waktu tertentu akan dikomunikasikan.

Konstruksi terkait dengan perubahan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan bangsa untuk bertindak dengan cara antisipatif dalam

Dengan demikian, Konsep kunci manajemen konstruksi adalah perubahan dan pertumbuhan, terutama perubahan sosial dan struktural dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan adalah proses implementasi perubahan sosial/struktural dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai kohesi sosial yang lebih baik.

Menurut American Public Works Association (Stone, 1974 di Kodoatie, 2005), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh sektor publik untuk

melakukan fungsinya dalam menyediakan air, udara, sanitasi, transportasi, infrastruktur bangunan, dan layanan lainnya untuk meningkatkan tujuan ekonomi dan sosial (Rahman and Widiasanti 2019). Pengembangan infrastruktur didasarkan pada sistem fisik untuk menyediakan transportasi, perumahan, drainase, bangunan dan fasilitas publik lainnya seperti telepon, komputer, dan pendingin udara umum yang mendukung masyarakat manusia di kedua bidang sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004). Infrastruktur adalah dasar dari sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sebuah sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai seperangkat fasilitas yang dibangun dan diperlukan, seperti bangunan individu, struktur dasar, dan instalasi, yang diperlukan untuk operasi sistem masyarakat dan sosial (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004)(Posumah 2015).

Infrastruktur adalah jenis sistem pendukung atau item yang berfungsi sebagai batu penjurur untuk proses yang sukses. Infrastruktur dianggap sebagai komponen penting dalam pengembangan ekonomi dan konstruksi. Konstruksi infrastruktur transportasi di dalam desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk desa. Infrastruktur dianggap sebagai komponen penting dalam perekonomian dalam proses ekonomi dan proses konstruksi. Untuk lebih jelasnya, tiga bidang utama pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut: Pembangunan konstruksi prasarana transportasi di dalam desa bertujuan untuk mengurangi menurunnya aksesibilitas penduduk desa, yaitu: jalan dari jembatan, dan dermaga. Prasarana transportasi dalam desa bertujuan untuk mengurangi menurunnya aksesibilitas penduduk desa, yaitu: jalan, jembatan, dan dermaga. Membangun infrastruktur untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat kebutuhan dasar termasuk menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Dilihat dari fungsinya Pemerintah Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan konstruksi, seperti membangun prasarana untuk sebuah desa dan membangun bidang untuk pendidikan kesehatan;
- b. Penerapan kemasyarakatan, adalah hal dan kewajiban, partisipasi masyarakat, perkembangan sosial masyarakat, agama, dan etika kerja;
- c. Kegiatan masyarakat umum, seperti mobilisasi sosial dan motivasi kelompok di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta kegiatan kelompok, olahraga, dan karang taruna;
- d. Menjaga kemitraan hubungan dengan organisasi lain dan lembaga masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur mengacu pada keinginan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur, termasuk program atau proyek yang mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur. Partisipasi komunitas sangat penting dalam proses membangun infrastruktur karena komunitas perlu dapat memberikan aspirasi tentang kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan baik secara individual maupun dalam kelompok yang dipercaya oleh komunitas dan orang lain.

Beberapa metode formal partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur meliputi:

- a. Masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Masyarakat memberikan tenaga kerja, baik secara fisik maupun nonfisik, dalam proses pembangunan infrastruktur.
- c. Masyarakat berkontribusi dengan keahlian dan pengetahuan mereka dalam proses pembangunan infrastruktur.
- d. Masyarakat menyediakan item atau daya sumber yang diperlukan untuk proses pembangunan infrastruktur.
- e. Masyarakat menyediakan uang atau dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Infrastruktur Desa Muara Baru menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur akan lebih efisien dan tepat waktu. Ini adalah hasil dari sentimen publik dan keinginan orang untuk berpartisipasi dalam musyawarah atau upaya kolektif untuk memahami dan menerapkan program untuk pembangunan infrastruktur di desa.

Namun, ada beberapa faktor yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur, seperti kurangnya keinginan masyarakat untuk memperhatikan kebutuhan atau keluhan individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi desa pentinggih pemerintah untuk memantau opini publik dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan infrastruktur.

Inilah kondisi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Muara Baru Kabupaten Kuburaya. Untuk memahami peran penelitian desa, penelitian ini mengacu pada pengamatan, tindakan, dan pengamatan.

### **Perencanaan**

Perencanaan adalah konsep yang dibahas dan diterapkan secara sistematis oleh organisasi yang relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah kemampuan untuk mengenali dan berkonsentrasi pada tugas, termasuk apa yang perlu dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses yang berkelanjutan yang berakhir ketika rencana disepakati dan perlu diimplementasikan. Perencanaan adalah proses pertama di mana pemerintah memutuskan apa yang perlu dibangun di Desa Malitu. Dalam artikel ini, pemerintah Desa Malitu menekankan pentingnya bekerja sama dengan rakyat.

### **Pelaksanaan**

Pembangunan segera berpengaruh, karena segera Apabila baik efektif dan pekerjaan selesai maka pemerintah menganggap rencana ini adalah. Demikian pula, apa yang terjadi di Desa Malitu adalah pekerjaan membangun jalan yang dilakukan oleh karyawan tidak dilakukan dengan baik dan tidak selesai tepat waktu. Selama melakukan konstruksi jalan baru di Desa Malitu, pemerintah hanya pernah melihat permukaan sekali, yang berarti orang-orang yang bekerja di sana tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Selama jam kerja, mereka lebih cenderung mengorbankan waktu untuk merenungkan, berlatih mindfulness, dan bersantai sebelum jam kerja.

### **Pengawasan**

Tujuan hakikat adalah untuk mencegah penggunaan dana untuk kegiatan yang sudah dibahas dan disepakati dalam APBN. Pendekatan ini berfokus pada penilaian hasil akhir dari semua proyek konstruksi jalan yang dilakukan. Kepemimpinan Desa Malitu sangat penting dalam proses perencanaan untuk mencapai hasil yang baik. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, pendekatan yang diambil Desa Marithu pemerintah dalam melakukan penelitian ini sangat penting. Metode yang digunakan oleh Pemerintah Marithu dalam mengawasi pembangunan jalan baru tidak rutin. Oleh karena itu, masih ada beberapa masalah yang belum terpecahkan. Kondisi untuk bepergian umumnya ringan dan tidak menuntut, jadi jika angin kuat dan perjalanan menjadi melelahkan. Akibatnya, masyarakat umum yang bekerja setiap hari di jalur produksi untuk memenuhi permintaan merasa sangat sulit karena kondisi jalur saat ini. Faktor penghambat Pembangunan infrastruktur di Desa Muara Baru:

Pentingnya pemerintah desa dalam menyediakan pembaruan jangka panjang pada program yang sudah dikategorikan. Ketika ada program yang baik dan menyeluruh yang disesuaikan dengan komunitas, komunitas akan dapat berpartisipasi dan mengikuti program

saat dilakukan. Kolaborasi antara pemerintah setempat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang program ini diharapkan akan memaksimalkan kontribusi masyarakat dalam mencapai kesuksesan program (Katili 2020).

Tingkat partisipasi dari komunitas Desa Muara Baru, di mana masih ada sejumlah besar orang yang tidak terganggu oleh pembangunan infrastruktur komunitas dan yang tidak mau mengungkapkan tujuan atau kekhawatiran mereka tentang program pembangunan.

uang yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah Desa Muara Baru masih belum bisa sepenuhnya mengoptimalkan masalah yang berkaitan dengan Proyek Desa Infrastruktur Bangunan.

Pemerintah desa Muara baru sangat berperan penting dalam hal program konstruksi desa, seperti memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan, masyarakat akan diberi insentif untuk berpartisipasi dan secara aktif mendukung pelaksanaan program. Memuaskan keberhasilan suatu program yang dilantian oleh pemerintah desa dengan peran pengoptimalan. Pemerintah desa penguatan peran membuat masyarakat lebih aktif dalam pembangunan yang ditujukan oleh dasa.

## **KESIMPULAN**

Penjatuhan Pidana kepada Pengguna Narkotika yang dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat daripada dilakukan Rehabilitasi. Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

## **REFERENSI**

- Alim, Ibnu Thosin Hidayatul, Yusuf Hariyoko, and Anggraeny Puspaningtyas. 2022. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan." Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi" 1 (1): 1689–99.
- Amantha, Goestyari Kurnia. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47 (1): 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>.
- Anggoro, Bayu, Fikri Hamidy, and Ade Dwi Putra. 2022. "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara)." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi* 2 (2): 54–61. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>.
- Aqil, Aris Dwi Cahyono. 2020. "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 2 (2): 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>.
- Katili, Andi Yusuf. 2020. "Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang Desa) Melalui Program Infrastruktur." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 3 (2): 95–102. <https://doi.org/10.37606/publik.v3i2.72>.
- Latif, Adam, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal MODERAT* 5 (1): 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2008. "Kesehatan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia." *Kesmas: National Public Health Journal* 2 (5): 195. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v2i5.249>.
- Posumah, Ferdy. 2015. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 15 (2): 1–13.
- Rahman, Muhammad Haristo, and Irika Widiyanti. 2019. "Analisa Pelaksanaan Manajemen Aset Infrastruktur Gedung Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta." *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa* 8 (2): 156–68. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa/article/view/1401/1024>.
- Rahum, Abu. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3 (4): 1–14. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal\(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal(11-05-15-10-50-31).pdf).
- Sasmito, Cahyo. 2017. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017) IMPLEMENTASI 6 (3): 72. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id).
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabilla, and Yohana Manulang. 2021. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (2): 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>.